

KATA PENGANTAR

Memenuhi amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip, pada kesempatan ini Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menerbitkan Pedoman Penyusutan Arsip yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan dalam mengelola arsip. Terbitnya buku pedoman ini sekaligus untuk menjawab persoalan mendasar mengenai penyusutan arsip sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memungkinkan otonomi daerah, termasuk dibidang pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip yang mencakup daur hidup arsip (*life cycle of records*) secara otonom, disamping memberikan peluang efisiensi juga tidak kalah pentingnya adalah mengandung resiko pemusnahan arsip bernilai guna pertanggungjawaban nasional tidak terkendali. Pedoman penyusutan arsip ini diharapkan dapat menjadi rambu-rambu untuk membantu instansi-instansi Pemerintah mengurangi eksekusi negatif tersebut, dan sekaligus melakukan seleksi arsip secara benar, sehingga arsip bernilai guna permanen di masing-masing instansi dapat dilestarikan sebagai arsip statis sebagai memori kolektif bangsa amat penting bagi pemeliharaan bukti jati diri bangsa, baik bagi suatu daerah maupun bagi pembangunan nasional.

Penyelesaian naskah pedoman ini dilakukan oleh suatu Tim Kerja dengan penanggungjawab Drs. Sauki Hadiwardoyo anggotanya terdiri atas : Sri Kusni, SH. , Bambang SR, S. Sos, Drs. F. Yuniarti, Msi., Dra. Dwi Mudalsih, Abdul Haris M. Ali, dan Ali Sugeng, S.E., serta sebuah Tim pengarah yang terdiri atas : M. Asichin, S.H., Drs. Djoko Utomo, M.A, dan Sumeh Abdul Hamid. Atas nama ANRI, kepada mereka diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih atas kesungguhan kerjanya.

Pada akhirnya dengan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, saya berharap bahwa buku Pedoman Penyusutan ini dapat dipergunakan di semua instansi pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Terima kasih.

Jakarta, 22 Desember 2000
Kepala Arsip Nasional RI

Dr. MUKHLIS PAENI